



Sistem Pengeluaran Dokumen Legal Pembiayaan untuk Peminjaman Kantor Cabang Seperti (Top Up, Lunas, Lelang, dan Audit)

Dewi Septiana

Universitas Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya, Indonesia

Email Korespondensi: dewisugitoseptiana23@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 10 April 2026

ABSTRACT

Islamic banking plays a crucial role in supporting economic growth through various financing products that comply with sharia principles. Legal document management is crucial in the financing process, as it serves as administrative and legal evidence between the bank and its customers. This study aims to determine the legal document management and issuance system for financing in the Financing Channel of Bank Syariah Indonesia FC Palembang, specifically for the top-up, settlement, auction, and audit processes. The research method used was a qualitative one, incorporating observation, interviews, direct practice, and documentation studies during the Field Work Practice (PKL) activities. The results indicate that the financing document management system has been implemented systematically through the process of assigning index numbers, archiving, and issuing documents in accordance with standard operating procedures (SOPs). The issuance process for financing documents is carried out based on operational needs, such as additional financing (top-ups), the return of collateral after settlement, legal proceedings for problematic financing through auctions, and document examinations during audit activities. The implementation of an orderly administration system and sound internal controls can minimize the risk of document loss and support the smooth operation of financing in Islamic banks.

Keywords: Financing documents, Islamic bank, document archiving financing channel.

ABSTRAK

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam proses pembiayaan tersebut, pengelolaan dokumen legal menjadi aspek yang sangat penting karena dokumen berfungsi sebagai bukti administratif dan hukum antara bank dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan dan pengeluaran dokumen legal pembiayaan pada Financing Channel Bank Syariah Indonesia FC Palembang, khususnya pada proses top up, pelunasan, lelang, dan audit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara, praktik langsung, dan studi dokumentasi selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dokumen pembiayaan telah dilaksanakan secara sistematis melalui proses pemberian nomor indeks, pengarsipan, serta pengeluaran dokumen sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Proses pengeluaran dokumen pembiayaan dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional seperti penambahan pembiayaan (top up), pengembalian jaminan setelah pelunasan, proses hukum pada pembiayaan bermasalah melalui lelang, serta pemeriksaan dokumen dalam kegiatan audit. Penerapan

sistem administrasi yang tertib serta pengendalian internal yang baik mampu meminimalkan risiko kehilangan dokumen dan mendukung kelancaran operasional pembiayaan di bank syariah.

Kata Kunci: *Dokumen Pembiayaan, Bank Syariah, Pengarsipan Dokumen, Financing Channel*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta didukung oleh peningkatan kinerja aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga yang terus mengalami tren positif. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang konsisten dan memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem keuangan nasional serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Annasthasya et al., 2025; Hendra, 2025). Selain itu, perkembangan ini juga diperkuat oleh kebijakan strategis pemerintah dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan yang mendorong transformasi industri perbankan syariah agar lebih kompetitif, resilien, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global (OJK, 2021).

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang berlandaskan nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan. Sejak berdiri pada tahun 2021 melalui merger bank-bank syariah milik negara, BSI mampu menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan aset dan tingkat kesehatan bank yang sangat baik, sehingga memperkuat posisinya sebagai motor penggerak industri perbankan syariah nasional (Annasthasya et al., 2025; Hendra, 2025). Keberadaan BSI juga mencerminkan upaya integrasi dan penguatan industri keuangan syariah guna meningkatkan daya saing di tingkat global, sekaligus mendukung inklusi keuangan berbasis syariah di masyarakat (Octavia, 2026).

Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah tidak hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan kepada nasabah, tetapi juga harus memperhatikan sistem administrasi dan pengelolaan dokumen yang baik. Pengelolaan dokumen yang sistematis dan terstruktur menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas operasional serta meminimalkan risiko kesalahan administratif yang dapat berdampak pada kinerja lembaga keuangan. Selain itu, tata kelola dokumen yang baik juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan syariah (Rahman et al., 2022; Sari & Putra, 2023). Dalam konteks ini, digitalisasi sistem administrasi juga mulai diadopsi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan akses terhadap dokumen pembiayaan (Firmansyah et al., 2024).

Dokumen pembiayaan merupakan bukti legal yang menjadi dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah. Dokumen tersebut meliputi akad pembiayaan, identitas nasabah, dokumen jaminan, serta dokumen pendukung lainnya yang harus disusun secara lengkap, akurat, dan sah secara hukum. Keberadaan dokumen

ini sangat krusial dalam proses audit, pengawasan, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu, pengelolaan dokumen pembiayaan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kedua belah pihak serta sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam perbankan syariah (Hidayat & Anwar, 2021; Lestari, 2023).

Pengelolaan dokumen pembiayaan yang tidak tertib dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti kehilangan dokumen, kesalahan administrasi, hingga permasalahan hukum yang berpotensi merugikan bank maupun nasabah. Risiko tersebut dapat berdampak pada terganggunya proses operasional, menurunnya kualitas layanan, serta meningkatnya potensi sengketa hukum akibat ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap lembaga perbankan harus memiliki sistem pengelolaan dokumen yang terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) guna memastikan keamanan, keakuratan, serta kemudahan dalam proses audit dan pengawasan. Selain itu, penerapan sistem digital dalam manajemen dokumen juga menjadi solusi strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mitigasi risiko operasional dalam perbankan syariah (Pratama & Yusuf, 2022; Wulandari et al., 2024)..

Salah satu unit kerja yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dokumen pembiayaan adalah *Financing Channel*. Bagian ini bertanggung jawab dalam pengarsipan, pencatatan, serta pengeluaran dokumen pembiayaan untuk berbagai keperluan seperti *top up* pembiayaan, pelunasan kredit, proses lelang agunan, maupun kegiatan audit. Peran strategis *Financing Channel* sangat menentukan kelancaran operasional bank, karena ketepatan dan ketersediaan dokumen menjadi faktor utama dalam mendukung proses layanan kepada nasabah serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, pengelolaan yang efektif pada unit ini juga berkontribusi dalam meminimalkan risiko kehilangan dokumen dan kesalahan administrasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja serta kualitas pengendalian internal dalam perbankan syariah (Nugraha & Prasetyo, 2022; Kurniawati et al., 2024).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan dan pengeluaran dokumen legal pembiayaan pada *Financing Channel* Bank Syariah Indonesia FC Palembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam, sistematis, dan faktual mengenai proses pengelolaan dokumen pembiayaan pada unit *Financing Channel* di Bank Syariah Indonesia FC Palembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan melalui pemahaman konteks, aktivitas, serta interaksi antar pelaku yang terlibat dalam proses administrasi pembiayaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menekankan pada proses, prosedur, serta mekanisme kerja yang berlangsung dalam

pengelolaan dokumen, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik yang diterapkan di lingkungan kerja tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Pertama, observasi langsung dilakukan dengan mengamati aktivitas kerja di bagian Financing Channel, khususnya yang berkaitan dengan proses pengarsipan, pencatatan, dan distribusi dokumen pembiayaan. Kedua, praktik langsung dilaksanakan dengan terlibat dalam kegiatan pengelolaan arsip dokumen pembiayaan, sehingga peneliti dapat memahami secara nyata alur kerja dan kendala yang dihadapi. Ketiga, wawancara dilakukan dengan pegawai dan supervisor guna memperoleh informasi terkait prosedur, kebijakan, serta sistem pengelolaan dokumen yang diterapkan. Keempat, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai arsip, dokumen pembiayaan, serta sistem administrasi yang digunakan oleh bank sebagai sumber data pendukung. Kombinasi dari berbagai teknik ini diharapkan dapat meningkatkan validitas data serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di unit Financing Channel Bank Syariah Indonesia FC Palembang yang berlokasi di Jalan R. Sukanto No. 6A, Simpang Patal, Kota Palembang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi unit kerja tersebut dengan fokus penelitian, yaitu pengelolaan dokumen pembiayaan dalam operasional perbankan syariah. Kegiatan penelitian dilakukan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yang berlangsung mulai tanggal 8 Januari 2026 hingga 6 Februari 2026. Selama periode tersebut, peneliti memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan kerja, memahami prosedur yang diterapkan, serta mengamati secara nyata sistem pengelolaan dokumen pembiayaan yang berjalan, sehingga data yang diperoleh bersifat aktual dan sesuai dengan kondisi di lapangan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dokumen pembiayaan merupakan salah satu kegiatan administrasi yang memiliki peranan sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional perbankan. Dokumen pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai bukti legal yang menjadi dasar hubungan antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, setiap dokumen harus dikelola secara tertib, sistematis, dan terstruktur agar dapat menjamin keamanan, keakuratan, serta kemudahan dalam proses penelusuran kembali ketika dibutuhkan. Pengelolaan dokumen yang baik juga mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan (good corporate governance) dalam lembaga perbankan.

Pada Financing Channel Bank Syariah Indonesia FC Palembang, pengelolaan dokumen pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi. Tahap pertama adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen, di mana setiap berkas pembiayaan diperiksa secara teliti untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi. Proses ini sangat penting untuk meminimalkan risiko kesalahan atau kekurangan dokumen yang dapat menghambat proses layanan atau menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Setelah dinyatakan lengkap,

dokumen kemudian diproses ke tahap selanjutnya untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut.

Tahapan berikutnya adalah pemberian nomor indeks pada setiap dokumen pembiayaan. Pemberian indeks ini bertujuan untuk mempermudah proses identifikasi dan pencarian dokumen secara cepat dan efisien. Setiap dokumen diberi kode khusus yang mencerminkan identitas nasabah, jenis pembiayaan, serta informasi penting lainnya yang relevan. Sistem pengindeksan ini menjadi bagian penting dalam manajemen arsip, karena membantu menghindari kesalahan pencarian serta meningkatkan efektivitas kerja pegawai dalam mengelola dokumen.

Setelah melalui proses pengindeksan, dokumen pembiayaan kemudian disusun ke dalam map arsip dan ditempatkan pada rak penyimpanan sesuai dengan kategori pembiayaan yang telah ditentukan. Penataan arsip dilakukan berdasarkan sistem pengarsipan yang berlaku di unit kerja tersebut, sehingga dokumen tersusun secara rapi dan mudah diakses. Dengan adanya sistem pengarsipan yang terorganisir dengan baik, proses pencarian, pengambilan, maupun pengembalian dokumen dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, serta mampu mendukung kelancaran operasional dan kegiatan audit di lingkungan perbankan.

Pengeluaran Dokumen Pembiayaan

Pengeluaran dokumen pembiayaan dilakukan untuk berbagai keperluan operasional bank, antara lain:

1. Top Up Pembiayaan

Top up merupakan penambahan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang sebelumnya telah memiliki pembiayaan aktif. Dalam proses ini, dokumen pembiayaan sebelumnya digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai kelayakan pembiayaan tambahan. pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) memungkinkan penambahan limit plafon untuk produk seperti Mitraguna Berkah (hingga Rp1 Miliar, tenor 15 tahun), Gadai Emas, dan KUR (maksimal Rp500 juta) melalui aplikasi BYOND by BSI atau cabang. Proses umumnya instan, tanpa perlu datang ke cabang untuk beberapa layanan, dan wajib tidak memiliki tunggakan.

Jenis Top Up Pembiayaan BSI: 1). BSI Mitraguna Berkah: Pengajuan top up dapat dilakukan via aplikasi BYOND by BSI sesuai penawaran yang muncul, dengan limit maksimal Rp1 Miliar dan tenor hingga 15 tahun; 2). Gadai Emas: Proses top up dapat dilakukan secara otomatis by system melalui BSI Mobile tanpa perlu ke cabang, dengan jangka waktu 4 bulan dan berpotensi diperpanjang; 3). KUR BSI: Nasabah dapat melakukan suplesi atau top up KUR hingga akumulasi plafon maksimal Rp500 juta, disesuaikan dengan limit sektor usaha; 4). BSI Griya: Fasilitas top up untuk menambah dana dengan memanfaatkan properti yang masih menjadi agunan, biasanya menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

2. Pelunasan Pembiayaan

Pelunasan pembiayaan merupakan tahap akhir dalam siklus pembiayaan di perbankan, yang terjadi ketika nasabah telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada pihak bank sesuai dengan akad yang telah disepakati. Proses ini menandakan berakhirnya hubungan pembiayaan antara bank dan nasabah, di

mana seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, pelunasan tidak hanya mencakup pembayaran pokok pembiayaan, tetapi juga meliputi margin, bagi hasil, serta kewajiban lainnya. Setelah itu, bank akan melakukan verifikasi akhir untuk memastikan tidak ada kewajiban yang tersisa serta melakukan penutupan administrasi pembiayaan dalam sistem internal.

Setelah proses tersebut selesai, dokumen jaminan yang sebelumnya disimpan oleh bank akan dikembalikan kepada nasabah sebagai bukti bahwa pembiayaan telah berakhir. Dokumen seperti sertifikat tanah, BPKB, atau bentuk agunan lainnya diserahkan kembali melalui prosedur yang telah ditetapkan, termasuk verifikasi identitas dan pencatatan administrasi. Pengembalian dokumen ini menjadi bukti sah bahwa bank tidak lagi memiliki hak atas jaminan tersebut, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasional perbankan syariah.

3. Lelang Agunan

Lelang dilakukan apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajiban pembiayaannya sehingga bank melakukan penjualan terhadap aset jaminan. Dokumen pembiayaan digunakan sebagai dasar hukum dalam proses lelang tersebut.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai lelang agunan BSI: 1). Prosedur Pembelian: Peserta dapat melihat aset di website lelang BSI, menghubungi petugas untuk pengecekan, dan mendaftar melalui situs resmi lelang.go.id; 2). Aset yang Dilelang: Umumnya terdiri dari tanah, rumah, dan ruko hasil dari pembiayaan yang macet; 3). Keamanan dan Legalitas: BSI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Penetapan Hak & Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN untuk menjamin legalitas aset; 4). Waktu dan Lokasi: Lelang dilaksanakan berkala, seringkali diumumkan melalui KCP (Kantor Cabang Pembantu) setempat atau media massa (misalnya di KPKNL); 5). Risiko Hukum: Meskipun lelang disetujui, dalam beberapa kasus, debitur dapat mengajukan gugatan jika menilai prosedur lelang tidak sesuai.

4. Audit

Audit merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap kelengkapan dokumen serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan oleh bank. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), prinsip kehati-hatian, serta ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam konteks perbankan syariah, audit juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, dokumen pembiayaan diperiksa secara menyeluruh untuk menilai kelengkapan, keabsahan, serta kesesuaian antara data administrasi dengan proses yang telah dilakukan. Auditor akan menelusuri berbagai dokumen seperti akad pembiayaan, identitas nasabah, dokumen jaminan, hingga catatan

transaksi untuk memastikan tidak terdapat penyimpangan atau kesalahan administrasi. Hasil dari kegiatan audit ini kemudian menjadi dasar evaluasi bagi pihak manajemen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meminimalkan risiko operasional dan hukum di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dan pengeluaran dokumen pembiayaan pada Financing Channel Bank Syariah Indonesia FC Palembang telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Pengelolaan dokumen dilakukan melalui proses pemeriksaan kelengkapan, pemberian nomor indeks, serta pengarsipan dokumen secara terstruktur.

Pengeluaran dokumen pembiayaan dilakukan untuk berbagai keperluan operasional seperti top up pembiayaan, pelunasan kredit, proses lelang agunan, serta kegiatan audit. Penerapan sistem administrasi yang tertib dan pengendalian internal yang baik dapat membantu meminimalkan risiko kehilangan dokumen serta mendukung kelancaran operasional pembiayaan di bank syariah. Kesimpulan berisi ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan dengan mengacu pada tujuan penelitian. Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian lanjutan. Penulisan kesimpulan dan saran menggunakan Times New Roman 11 point (tegak) dengan spasi 1. Paragraf diawali dengan kata yang menjorok ke dalam 5 digit dan tidak boleh menggunakan bullet atau nomor. Ditampilkan dalam 1 paragraf..

DAFTAR RUJUKAN

- Annasthasya, A., et al. (2025). Pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan aset pada Bank Syariah Indonesia. *Sainmikum*, 2(6), 474-479. <https://doi.org/10.0000/sainmikum.v2i6.1380>
- Ascarya. 2020. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firmansyah, R., Nugroho, A., & Putri, D. (2024). Digitalisasi administrasi perbankan syariah dalam meningkatkan efisiensi operasional. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 45-56. <https://doi.org/10.21043/jesi.v14i1.19876>
- Hendra, D. (2025). Analisis tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia dengan metode RBBR. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 19(1). <https://doi.org/10.0000/jm.v19i1.2510>
- Hidayat, T., & Anwar, M. (2021). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 112-125. <https://doi.org/10.24235/jhei.v5i2.8765>
- Kasmir. 2023. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurniawati, I., Rahman, A., & Putri, S. (2024). Peran pengendalian internal dalam pengelolaan dokumen pembiayaan pada bank syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 12(1), 77-89. <https://doi.org/10.35836/jaki.v12i1.3456>

- Lestari, D. (2023). Manajemen dokumen pembiayaan sebagai mitigasi risiko hukum pada perbankan syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 8(1), 67-79. <https://doi.org/10.14421/jmks.2023.08105>
- Muhammad. 2021. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nugraha, D., & Prasetyo, E. (2022). Efektivitas manajemen operasional dalam meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah. *Jurnal Manajemen Perbankan*, 9(2), 134-145. <https://doi.org/10.21009/jmp.v9i2.2987>
- Octavia, P. (2026). Analisis pengaruh sektor keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *RIGGS Journal*. <https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1021608>
- OJK. 2020. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Optimal Research Hub. (2025). Pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia: Sebuah tinjauan pustaka. *Optimal Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.0000/optimal.v5i1.5678>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020-2025. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>
- Pratama, R., & Yusuf, M. (2022). Manajemen risiko operasional dalam pengelolaan dokumen perbankan syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), 101-113. <https://doi.org/10.31000/jkps.v6i2.7890>
- Rahman, F., Aziz, A., & Kurniawan, B. (2022). Tata kelola administrasi dalam meningkatkan kinerja bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 10(2), 89-101. <https://doi.org/10.36908/jps.v10i2.14567>
- Sari, N., & Putra, R. (2023). Pengaruh pengelolaan dokumen terhadap kepercayaan nasabah pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 23-34. <https://doi.org/10.30868/jebi.v9i1.2345>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wulandari, S., Hadi, A., & Ramadhan, F. (2024). Digitalisasi arsip sebagai upaya peningkatan efisiensi dan keamanan dokumen pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 12(1), 55-66. <https://doi.org/10.35912/jtm.v12i1.2234>